

PEMBANGUNAN SOSIAL:TANTANGAN DI INDONESIA

M. Fadhil Nurdin

Pengantar

Pembangunan sosial di Indonesia memerlukan pemikiran yang selaras antara konsepsi dengan prakteknya. Kegiatan pembangunan sosial merupakan usaha yang tiada henti, selama masalah bangsa ini masih ada dan memerlukan bantuan penyelesaiannya. Fokusnya adalah untuk *membangun manusia* dengan tujuan memungkinkan rakyat menikmati kehidupan yang kreatif, sehat dan sejahtera. Pembangunan sosial perlu dilakukan untuk meningkatkan kesadaran, tanggungjawab serta kemampuan setiap warga negara untuk ikut serta dalam pembangunan. Strategi dalam pelaksanaannya berasaskan *prinsip kerjasama* dari unsur pemerintah, organisasi masyarakat dan kelompok masyarakat lokal perlu wujud untuk lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan Sosial

Pembangunan sosial dipandang sebagai satu konsep dan pendekatan untuk mempromosikan kesejahteraan manusia. Istilah "Pembangunan Sosial" telah menjadi tema besar dalam pembangunan manusia menjelang *World Summit for Social Development* pada Mac 1995 di Copenhagen. Pembangunan sosial sebagai komitmen untuk meletakkan "*manusia sebagai pusat perhatian pembangunan-dan kerjasama internasional*" dengan tujuan untuk memenuhi keperluan sosial sebagai bagian integral untuk stabilitas nasional dan Internasional yang Lebih besar (Boer & Koekkoek 1994; Midgley 1994, Macarov 1995). Ini menunjukkan bahwa pembangunan sosial bukan hanya memberi barang, pelayanan atau pemuliharaan bagi penyandang masalah sosial saja, tetapi ditujukan kepada masyarakat yang lebih luas, untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas hidup manusia, dengan mempromosikan pentingnya kesejahteraan manusia.

Pembangunan sosial berusaha menggabungkan berbagai pendekatan (saintifik maupun kemanusiaan yang berorientasi praktis dalam pembangunan terpadu. Upaya membangun suatu mode! pendekatan, perlu satu strategi pembangunan berkelanjutan, yang dikenal "*komitmen dan strategi global*". Kegiatan ini berfungsi untuk membentuk "kerjasama baru" antara pemerintah dengan organisasi bukan pemerintah (LSM) yang mengamalkan satu pandangan bersama mengenai paradigma dan etika sosial baru. Artinya, sama dengan upaya untuk memperbaiki keadaan hidup orang (menjadi tugas utama kebijakan sosial). Semua kegiatan ini akan berkaitan dengan tanggungjawab (moral, sosial, politik, dan ekonomi) untuk mengurangi kemelaratan dan kemiskinan. Selain itu, setiap pendekatan dan strategi tidak dapat dilaksanakan tanpa menggabungkan dan menerima sumbangan dari disiplin lain secara kreatif dan dinamik. Oleh karena itu, pendekatan dan strategi pembangunan sosial, secara konseptual dan komprehensif, perlu dilihat dari: ada situasi sosial yang menunjukkan pembangunan sosial menginginkan perubahan ; ada proses pembangunan sosial;

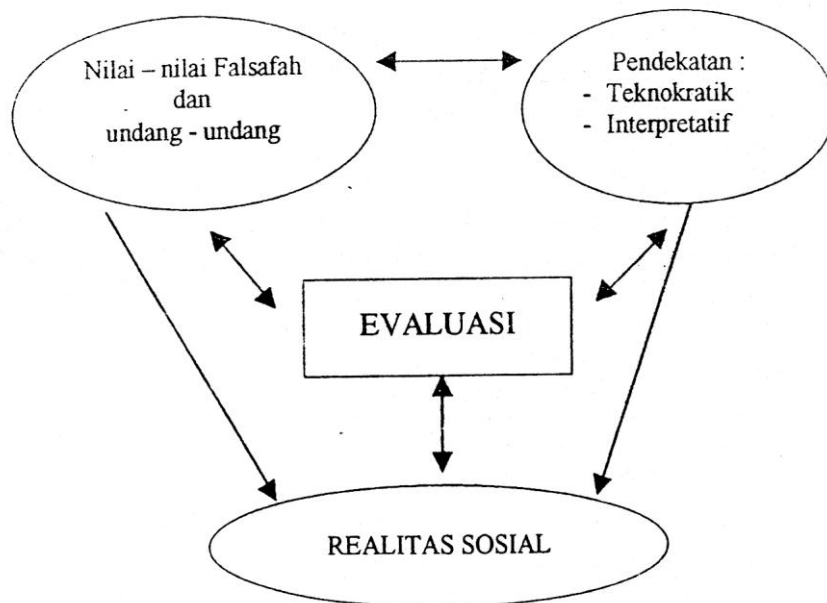
proses pembangunan sosial itu ditujukan untuk mencapai tujuan (Midgley, 1995; Spicker 1995). Dengan demikian, pembangunan sosial perlu pendekatan baru karena semakin luas dan kompleksnya lingkup bidang ini dalam pembangunan. Karena itu, pendekatan, strategi dan pencapaian pembangunan sosial berusaha membangun sintesis baru untuk mencapai tujuan pembangunan yang berorientasikan pada kesejahteraan.

Inti dari upaya membangun model pendekatan pembangunan sosial adalah menggunakan evaluasi sebagai sebuah konsep yang diartikan sebagai kajian sistematis yang dirancang dan dilaksanakan untuk memperbaiki kehidupan rakyat. Secara khusus, evaluasi perlu untuk memperbaiki *kualitas* dengan meregulasi semua aspek kehidupan manusia. Dalam perkembangannya, evaluasi semakin lebih mementingkan keterbukaan sebagai cara berfikir skeptis (teknis rasional) dalam organisasi yang mempunyai tujuan dan *nilai-nilai* (bukan hanya mementingkan '*produk hasil kerja*'). Pendekatan evaluasi telah menjadi satu *strategi pelaksanaan* dengan menempatkan manusia sebagai sumber daya, dan mengutamakan pelayanan kemanusiaan secara efisien. Pendekatan evaluasi yang bersifat *teknis rasional*, dapat digabungkan dengan *pendekatan interpretatif* telah melahirkan pendekatan yang lebih kritis. Pendekatan evaluasi yang baru ini dianggap lebih baik karena memudahkan mempunyai keterbukaan 'debat' mengenai nilai praktis, baik dalam kebijakan maupun pelaksanaan program pembangunan (Stufflebeam & Shinkfield 1985; Posavac & Carey 1985; Everitt & Hardiker 1996).

Dalam konteks dan ruang lingkup pendekatan evaluasi menjadi semakin lebih luas, bukan hanya berkenaan dengan *nilai-nilai atau falsapah, undang - undang, kebijakan dan program*. Namun dapat berkenaan juga dengan eksistensi aktor (*pelaksana*), *nilai - nilai, dan aspirasi rakyat*. Bagaimanapun, kajian yang berkenaan dengan nilai sangat penting, karena akan memberikan satu gambaran mengenai *tugas - tugas evaluator* yang harus mempunyai tanggungjawab moral kepada masyarakat dalam arti luas. Sebagai gambaran, pendekatan pembangunan sosial di dunia ketiga kurang berhasil, karena lebih dilihat sebagai *metode pembangunan ekonomi, yang kurang memperhatikan aspek nilai-nilai, dan aspirasi masyarakat lokal*. Pendekatan evaluasi pembangunan sosial dapat digambarkan seperti berikut:

Gambar

MODEL EVALUASI DALAM PEMBANGUNAN SOSIAL



Tantangan di Indonesia

Pembangunan sosial di Indonesia, pada hakekatnya merupakan usaha untuk mensejahterakan bangsa. Tantangan pembangunan sosial bukan hanya menjadi tanggungjawab Departemen Sosial, banyak tugas lain yang terkait dan harus dilakukan bersama - sama dengan departemen lain. Walaupun demikian, tidak menutup kemungkinan Departemen Sosial merestrukturisasi tugas - tugas dengan menyesuaikan substansi dari konsepsi (filsafat dan teori) ke dalam praktek dengan menempatkan pembangunan sosial sebagai fungsi dan prioritas utamanya.

1. Mengatasi Masalah Struktural.

Usaha ini beranjak kesadaran bahwa wujud masalah struktural dalam berbagai dimensi pembangunan sosial. Dalam konteks ini, diperlukan penyesuaian dalam berbagai kebijakan pemerintah yang berpihak kepada kepentingan dan kesejahteraan rakyat (tugas Menko Kesra).

2. Melindungi Rakyat.

Usaha ini untuk memberikan perlindungan dan pelayanan yang memihak kepada yang lemah (tugas Menko Polsoskam).

3. Memberdayakan Masyarakat.

Upaya ini dapat dilakukan dengan mendorong, menyadarkan, dan memperkuat daya masyarakat dengan langkah - langkah yang terencana secara positif. Kegiatan ini memerlukan peluang yang layak dan sesuai diberikan oleh pemerintah yang akan membuat rakyat semakin sejahtera dan sehat, terutama melalui perbaikan *sistem dan jaringan* pelayanan sosial (tugas Departemen Sosial dan berbagai departemen teknis terkait).

Untuk mengimplementasikan strategi di atas, perlu memperhatikan berbagai faktor terkait, antara lain :

1. Penelitian (pemetaan masalah dan Analisis SWOT), untuk mereformulasi kebijakan pembangunan sosial, dari tingkat nasional sampai daerah;
2. Meningkatkan kepercayaan (moralitas) dan kesadaran publik dengan membangun kemitraan serta partisipasi antara "*stake holder*";
3. Kerjasama antar daerah dan antar negara untuk membangun kapasitas dalam kegiatan utama (memperkuat koordinasi dengan Menko KESRA dan Menko lainnya);
4. Membangun program nyata dan pelayanan langsung. Apabila perlu menggunakan "crisis centre" dalam masyarakat.

Evaluasi dalam membangun sosiaS, bukan hanya mungkin dilakukan secara profesional oleh Pekerja sosial, karena mempunyai lingkup yang luas dari tingkat lokal sampai interoasional; banyak profesi lain yang harus dilibatkan dalam kegiatan evaluasi ini. Namun, karena kegiatan yang harus dihadapi dalam usaha rnensejahterakan rakyat luas lingkungannya. maka kegiatan yang perlu dilakukan antara lam : mencegah meluasnya masalah sosial, dan upaya yang mengarah pada disintegrasi bangsa, mengembangkan ketahanan sosial, dan membina lembaga - lembaga yang melaksanakan pelayanan sosial.

Penutup

Dalam menumbuhkembangkan Departemen Sosial yang baru saja "dimatikan" oleh kabinet yang lalu, dan dalam rangka otonomi daerah, maka sistem dan mekanisme birokrasi di dalam Departemen ini perlu memosisikan diri agar dapat menjadi "mitra yang baik" dalam pembangunan nasional. Bahkan. bagaimana menjadikan Departemen Sosial yang dominan dan sentral, terutama dalam perancangan kebijakan maupun pelaksanaan pembangunan sosial di Indonesia. Posisi ini hanya mungkin dicapai, apabila mempunyai "kuasa" yang didukung oleh sumber daya manusia (SDM) yang tangguh untuk melaksanakan pembangunan sosial secara efektif dan efisien.

SUMBER RUJUKAN:

- Boer L & Keokkoek A, "Development and Human Security", Third Word Quarterly Journal of Emerging Areas, 15(3), Sept 1994.
- Everitt A. & Hardiker P, 1996, Evaluating for Good Practice, London, MacMillan Press.
- Macarov, D, 1995, Social Welfare: Structure and Practice, Sage Pub, Condon.
- Midgley J, 1994, "The Challenge of Social Development: Their Third Word and Ours 1993, Daniels S. Sanders Peace and Social Justice Lecture", Social Development Issues, Vol. 16 (2).
- Midgley J, 1995, Social Development : The Development Perspective in Social Welfare, London, Sage Publication.
- Posavac E.J & Carey R.G, 1985, Program Evaluation, Methods and Case Studies, New Jersey, Prentice Hall, Inc.
- Stufflebeam D.L & Shinkfield A.J, 1985, Systemic Evaluation: A Self Instructional

Guide to Theory and Practice, Boston, Kluwer-Nijhoff Publishing.